



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RUSMAN SUDARSONO
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 522756

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 572.000.000

1. Tanah Seluas 4.455 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KEPAHIANG, WARISAN Rp. 99.000.000
2. Tanah Seluas 240 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KEPAHIANG, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
3. Tanah Seluas 200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KEPAHIANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.500.000
4. Tanah Seluas 240 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KEPAHIANG, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
5. Tanah Seluas 150 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KEPAHIANG, HASIL SENDIRI Rp. 38.500.000
6. Tanah Seluas 15.652 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SELUMA, WARISAN Rp. 220.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 28.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 28D MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.850.000
2. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 6.650.000
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.022.091
F. HARTA LAINNYA	Rp.	94.500.000
Sub Total	Rp.	720.022.091
III. HUTANG	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>720.022.091</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.